

I. PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu masalah paling besar yang dihadapi setiap Negara (Sulastomo, 2011). Definisi tentang kemiskinan sangat beragam, mulai dari sekedar ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan memperbaiki keadaan, kurangnya kesempatan berusaha, sehingga pengertian yang lebih luas yang memasukkan aspek sosial dan moral. Dalam arti sempit, kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Dalam arti luas, kemiskinan merupakan fenomena multiface atau multidimensional. Menurut Khomsan et al (2015) kemiskinan adalah apabila pendapatan suatu komunitas atau kelompok masyarakat berada dibawah satu garis kemiskinan tertentu. Kemiskinan merupakan ketidakmampuan warga suatu Negara dalam memenuhi kebutuhan hidup seperti kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan dan minimnya lapangan kerja.

Berdasarkan UUD 1945 pasal 34 ayat 1 disebutkan bahwa “Fakir miskin dan anak- anak yang terlantar dipelihara oleh negara” serta dalam pasal 34 ayat 2 UUD 1945 juga dijelaskan bahwa “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat manusia”. Untuk mengimplementasikan pasal 34 ayat 2 UUD 1945, berbagai upaya sudah banyak dilakukan pemerintah untuk memutus mata rantai kemiskinan dengan mengeluarkan program-program sosial. Peran dari pemerintah sangat diperlukan, mengingat kebijakan dan peraturan yang

dibuat menjadi acuan dalam mendorong kearah pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Program-program mengenai pengentasan kemiskinan.

Salah satu program sosial yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengurangi beban masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pokok dimulai pada awal Krisis Moneter tahun 1998 yang disebut dengan Program OPK (Operasi Pasar Khusus), Pelaksanaa Program Operasi Pasar Khusus di selenggarakan dengan sistim tebus, masyarakat dapat membeli beras dengan jumlah yang tidak terbatas dengan harga yang telah disubsidi oleh pemerintah. Pelaksanaan Program Operasi Pasar Khusus yang diselenggarakan pemerintah tidak berlangsung lama, banyaknya permasalahan yang muncul, seperti yang dikutip dari lama resmi BULOG dikatakan ditemukan maraknya berbagai daerah penimbunan beras Operasi Pasar Khusus ini, dengan permasalahan yang ada tersebut Program Operasi Pasar hanya dapat berjalan selama 5 tahun, yang kemudian di ubah menjadi Program RASKIN (Beras Bantuan Bagi Masyarakat Miskin).

Perubahan Program Operasi Pasar Khusus menjadi Program RASKIN pada tahun 2002 oleh pemerintah diperluas fungsinya tidak lagi menjadi Program Darurat (*Social Safety Net*) seperti yang diselenggarakan pada OPK, melainkan menjadi bagian dari Program Perlindungan Sosial Masyarakat. Pelaksanaan Program RASKIN berlangsung tidak seperti OPK, Penerima manfaat Program RASKIN adalah masyarakat yang telah ditentukan oleh pemerintah melalui musyawarah tingkat desa/kelurahan yang sumber datanya hingga tahun 2006 berasal dari sumber data BKKBN. Barulah pada tahun 2008 pemerintah

menggunakan data PPLS 2008 dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai sumber data Program Raskin.

Pelaksanaan Program RASKIN dilakukan dengan sistem tebus, setiap masyarakat yang terdaftar sebagai penerima Program RASKIN melakukan tebus beras dengan harga yang murah dengan harga tebus pertama Rp.1000 hingga tahun 2009 menjadi Rp.1.600 per Kilogram dengan jatah 15kg setiap keluarga. Hingga pada tahun 2015 Nama Program RASKIN di ubah kembali menjadi Program RASTRA. Perubahan nama Program Beras Bantuan Bagi Masyarakat Miskin (RASKIN) menjadi Beras Sejahtera (RASTRA) dilakukan atas dasar pemikiran agar beras RASTRA yang disubsidi kepada masyarakat dapat menjadikan masyarakat tersebut sejahtera. Hingga pada tahun 2017 Pemerintah kembali merubah Program RASTRA menjadi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Bantuan pangan non tunai (BPNT) merupakan bantuan dari program pemerintah yang diberikan kepada warga miskin di Indonesia yang sudah data masuk ke dalam program keluarga harapan (PKH) atau keluarga penerima manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme kartu elektronik atau akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli kebutuhan pangan masyarakat di E-Warong (elektronik warong) atau pedagang bahan pangan yang terdaftar memenuhi persyaratan dan bekerjasama dengan Bank Negara seperti Bank BRI, BTN, dan lain sebagainya.

Manfaat BPNT sebagaimana yang disebutkan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) adalah meningkatnya ketahanan pangan di tingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan

penanggulangan kemiskinan. Meningkatnya efisiensi penyaluran bantuan sosial. Meningkatnya transaksi nontunai untuk mendukung Gerakan Nasional Nontunai (GNNT), dan Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah terutama usaha mikro dan kecil di bidang usaha penjualan beras dan/atau telur.

Pangan merupakan salah satu kebutuhan yang dibutuhkan bagi kehidupan keseharian manusia, dan manusia tidak bisa terlepas dari kebutuhan ini. Peran pangan bukan hanya penting untuk memenuhi kebutuhan fisik dasar dan mencegah kelaparan, namun lebih jauh dari itu peranan kandungan gizi di dalamnya penting bagi peningkatan kecerdasan dan kualitas hidup untuk menghasilkan manusia yang sehat, cerdas, aktif dan produktif yang sebagaimana disebutkan dalam definisi ketahanan pangan (Badan Ketahanan Pangan, 2019). Oleh karena itu, kecukupan pemenuhan pangan dalam jumlah dan mutunya berkorelasi positif dengan produktivitas kerja dan pertumbuhan otak serta kecerdasan yang berperan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kebutuhan pangan erat kaitannya dengan tingkat ekonomi masyarakat. Semakin tinggi pendapatan masyarakat, maka tingkat kemiskinan wilayah semakin rendah. Apabila dilihat dari jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi, jumlah penduduk miskin termasuk ke dalam kategori sedang. Terlihat pada Tabel 1 tentang Angka Kemiskinan Provinsi Jambi Tahun 2010-2020. Perkembangan kemiskinan pemerintah Provinsi Jambi tahun 2010-2020 dapat terlihat pada tabel dibawah ini. Berdasarkan Tabel 1 secara keseluruhan dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan angka kemiskinan jika diteliti secara keseluruhan di Provinsi Jambi sangat berfluktuasi.

Tabel 1. Angka Kemiskinan Provinsi Jambi Tahun 2010-2019

| Tahun | Jumlah Penduduk Miskin (jiwa) | Tren Penduduk Miskin (%) |
|-------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| 2010 | 260.400 | - |
| 2011 | 251.800 | -3,30 |
| 2012 | 268.500 | 6,63 |
| 2013 | 277.700 | 3,43 |
| 2014 | 281.750 | 1,46 |
| 2015 | 300.710 | 6,73 |
| 2016 | 289.810 | -3,62 |
| 2017 | 286.550 | -1,12 |
| 2018 | 282.766 | -1,32 |
| 2019 | 274.320 | -2,99 |
| 2020 | 270.842 | -1,41 |
| Rata -rata | 276.832 | 0,86 |

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, 2021

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang dirasakan langsung oleh masyarakat, kemiskinan merupakan konsep dan fenomena multidimensional. Berikut ini dapat dilihat perkembangan tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi pada Tabel 2.

Tabel 2. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2017 – 2020 (Ribuan Jiwa)

| Wilayah | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Kerinci | 17,62 | 16,79 | 17,00 | 16,35 |
| Merangin | 35,48 | 33,95 | 32,88 | 32,23 |
| Sarolangun | 25,61 | 25,70 | 25,39 | 24,74 |
| Batang Hari | 27,49 | 27,55 | 26,53 | 26,54 |
| Muaro Jambi | 18,28 | 17,38 | 16,86 | 16,21 |
| Tanjung Jabung Timur | 27,22 | 26,99 | 25,35 | 24,7 |
| Tanjung Jabung Barat | 36,33 | 36,28 | 35,12 | 34,47 |
| Tebo | 23,18 | 22,86 | 22,83 | 22,18 |
| Bungo | 20,81 | 21,11 | 20,87 | 20,22 |
| Kota Jambi | 52,08 | 50,61 | 48,95 | 48,3 |
| Kota Sungai Penuh | 2,46 | 2,48 | 2,55 | 1,90 |
| Jumlah | 286,55 | 281,69 | 274,32 | 270,84 |

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, 2021

Terlihat pada Tabel 2, jumlah penduduk miskin terbanyak berada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan jumlah penduduk sebanyak 344.700

ribu jiwa pada tahun 2020. Jumlah penduduk miskin ini juga berkaitan dengan potensi sumber daya alam yang dikembangkan di wilayah tersebut. Salah satu daerah yang memiliki potensi yang baik dibidang pertanian adalah Kabupaten Batang Hari. Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Batang Hari bahwa penduduk miskin di Kabupaten Batang Hari dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2019 terus meningkat. Terlihat pada Tabel 3, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Batang Hari pada tahun 2012 sebesar 254.300 dengan persentase penduduk miskin sebesar 10,13 persen, mengalami tren yang menurun pada tahun 2020 menjadi 265.400 jiwa atau sebesar 9,65 persen dari jumlah penduduk. Berikut ini adalah data kemiskinan di Kabupaten Batang Hari.

Tabel 3. Jumlah Penduduk Total dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Batang Hari Tahun 2012-2020

| Tahun | Jumlah Penduduk (ribu jiwa) | Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa) | Persentase Penduduk Miskin (%) |
|--------------|--|---|---|
| 2012 | 257,61 | 25,43 | 10,13 |
| 2013 | 276,34 | 26,52 | 10,42 |
| 2014 | 284,45 | 27,09 | 10,50 |
| 2015 | 300,39 | 28,10 | 10,69 |
| 2016 | 306,33 | 28,39 | 10,79 |
| 2017 | 283,97 | 27,49 | 10,33 |
| 2018 | 281,84 | 27,55 | 10,23 |
| 2019 | 258,67 | 26,53 | 9,75 |
| 2020 | 256,11 | 26,54 | 9,65 |

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang Hari , 2021

Fenomena kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Batang Hari khususnya di tentu memerlukan perhatian khusus dari pemerintah. Melalui program-program penanggulangan kemiskinan maupun pemberdayaan masyarakat miskin, pemerintah terus berusaha supaya angka kemiskinan bisa terus berkurang. Salah satu program tersebut adalah Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). BPNT diluncurkan sebagai upaya untuk menyalurkan bantuan pangan, yang

selama ini melalui program Raskin, agar lebih tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu. Melalui Program BPNT diharapkan dapat memberikan keleluasaan penerima manfaat program dalam memilih jenis, kualitas, harga, dan tempat membeli bahan pangan. Program BPNT juga diharapkan dapat sekaligus meningkatkan ekonomi rakyat dengan memberdayakan ribuan kios/warung/toko yang ada sehingga dapat melayani transaksi secara elektronik melalui sistem perbankan.

Melalui sistem perbankan, penyaluran BPNT diharapkan juga dapat mendorong perilaku produktif masyarakat. Lebih jauh, penggabungan dengan program bantuan sosial lain melalui sistem perbankan akan memberikan kesempatan akumulasi aset yang berpotensi mendorong kegiatan ekonomi. BPNT merupakan salah satu bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM. Bantuan tersebut dalam bentuk e-voucher yang disalurkan melalui Bank Himbara. E-voucher ini digunakan untuk membeli bahan pangan yang mengandung sumber karbohidrat seperti beras dan sumber protein seperti telur dan daging ayam di e-warung terdekat.

KPM bebas memilih bahan pangan tersebut. Setiap KPM akan menerima bantuan setiap bulan sebesar Rp.200.000.-. Besaran bantuan yang diterima mengalami kenaikan dari sebelumnya yang hanya berkisar Rp.150.000.-, Berdasarkan data dari Dinas Sosial Kabupaten Batang Hari diketahui bahwa Kabupaten Batang Hari penerima BPNT berjumlah 14.484 KPM. Berdasarkan data pada Tabel 3, jumlah penduduk miskin mengalami penurunan sejak tahun 2019. Salah satunya dikarenakan penduduk miskin memperoleh manfaat dari berbagai program pemerintah antara lain Program BPNT. Total penduduk di

Kabupaten Batang Hari yaitu sebanyak 301.700 jiwa dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 26.540 jiwa pada tahun 2020. Dilihat dari jumlah penerima manfaat di Kabupaten Batang Hari , terdapat 14.484 pada tahun 2020 yang menjadi KPM Program BPNT. hal ini dapat disimpulkan bahwa lebih dari 54 persen penduduk miskin di Kabupaten Batang Hari telah memperoleh manfaat dari Program BPNT.

Program BPNT merupakan salah satu dalam peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, hadirnya Program BPNT di Kabupaten Batang Hari diharapkan dapat memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Batang Hari , khususnya bagi penerima manfaat Rincian penerima manfaat BPNT di Kabupaten Batang Hari dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Jumlah Penduduk dan Jumlah KPM Program BPNT di Kabupaten Batang Hari Tahun 2020

| No | Kecamatan | Jumlah Penduduk (Jiwa) | Jumlah Penerima (KK) |
|----|----------------|---------------------------|-------------------------|
| 1 | Mersam | 33.246 | 2.264 |
| 2 | Maro Sebo Ulu | 39.588 | 1.824 |
| 3 | Batin XXIV | 31.749 | 1.184 |
| 4 | Muara Tembesi | 33.894 | 2.076 |
| 5 | Muara Bulian | 68.960 | 2.584 |
| 6 | Bajubang | 41.957 | 2.412 |
| 7 | Maro Sebo Ilir | 15.321 | 856 |
| 8 | Pemayung | 36.985 | 1.284 |
| | Jumlah | 301.700 | 14.484 |

Sumber: Dinas Sosial dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang Hari , 2021

Salah satu daerah yang mejadi lokasi KPM tersebut adalah Kecamatan Mersam. Jumlah KPM pada program tersebut pada tahun 2020 yaitu sebanyak 2.264 KK. Tujuan dari penyaluran bantuan tersebut yaitu mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan. Memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM. Meningkatkan ketepatan sasaran dan

waktu pemberian bantuan pangan kepada KPM. Memberikan pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan, dan Mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*).

Konsep ketahanan pangan menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 1996 adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Berdasar konsep tersebut, maka terdapat beberapa prinsip yang terkait, baik langsung maupun tidak langsung terhadap ketahanan pangan (*food security*), yang harus diperhatikan (Sumardjo, 2006). Kondisi ketahanan pangan ini sangat erat kaitannya dengan perekonomian masyarakat. Apabila sebuah keluarga memiliki pendapatan yang memadai, maka ketahanan pangan dapat terjamin, sebaliknya apabila sebuah keluarga dalam kategori tidak mampu atau miskin, maka ketahanan pangan akan terganggu. Melalui program BPNT, pemerintah berupaya untuk membantu penduduk miskin yang termasuk dalam KPM untuk menjaga kualitas ketahanan pangannya dengan membantu akses dan ketersediaan pangan melalui program tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah diungkapkan di atas maka peneliti ingin melihat bagaimana ketercapaian dari Program BPNT yang ada di Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari dengan melihat bagaimana dampak dari Program BPNT yang ada di Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari , apakah telah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dari pelaksanaan Program. Untuk itu peneliti memberi judul pada penelitian ini dengan judul: **“Dampak Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Terhadap**

Ketahanan Pangan Keluarga di Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari”.

1.2. Rumusan Masalah

Kabupaten Batang Hari merupakan salah satu dari 44 Kota/Kabupaten yang menjadi *Pilot Project* dari pelaksanaan Program BPNT pada Tahun 2017. Sejak tahun 2017 seluruh kecamatan dan kelurahan yang ada di Kabupaten Batang Hari telah mendapatkan layanan Program BPNT dengan dilayani oleh 38 *Electronic Warong* (e-warong) yang tersebar diseluruh kecamatan dan kelurahan yang ada di Kabupaten Batang Hari . Berdasarkan tujuan dari Pelaksanaan Program BPNT ini diharapkan dengan adanya Program BPNT dapat merimbasi atau berdampak terhadap ketahanan pangan keluarga miskin di lokasi tersebut.

Program BPNT berdasarkan Perpres No.63/Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (BSNT) bertujuan 1) mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan 2) Memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM. 3) Meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan Bantuan Pangan bagi KPM. 4) Memberikan pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan. 5) Mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*). Sedangkan manfaatnya adalah 1) Meningkatnya ketahanan pangan di tingkat KPM, sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. 2) Meningkatnya efisiensi penyaluran bantuan sosial. 3) Meningkatnya transaksi non tunai dalam agenda Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT). 4) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah,

terutama usaha mikro dan kecil yang sudah berpengalaman dalam usaha penjualan telur dan beras

Ketahanan pangan di suatu daerah dapat diukur menggunakan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan. Penilaian ketahanan pangan terdiri dari tiga aspek, yaitu aspek ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan. Aspek ketersediaan dapat dilihat dari kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri, cadangan pangan, serta pemasukan pangan (termasuk impor dan bantuan pangan) adalah kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Aspek akses pangan adalah kemampuan rumah tangga untuk memperoleh cukup pangan yang bergizi, melalui berbagai sumber, seperti produksi dan persediaan sendiri (pembelian, barter, hadiah, pinjaman, dan bantuan pangan).

Aspek pemanfaatan pangan merujuk pada penggunaan pangan oleh rumah tangga dan kemampuan individu untuk menyerap dan metabolisme zat gizi. Pemanfaatan pangan juga meliputi cara penyimpanan, pengolahan dan penyiapan makanan, keamanan air untuk minum dan memasak, kondisi kebersihan, kebiasaan pemberian makan (terutama bagi individu dengan kebutuhan khusus), distribusi makanan dalam rumah tangga sesuai dengan kebutuhan, dan status kesehatan setiap anggota keluarga terutama pola konsumsi energi dan protein (Badan Ketahanan Pangan, 2019).

Kebutuhan tubuh setiap individu akan komponen gizi berbeda dikenal istilah Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA). Pangan beragam dan bergizi artinya terdapat lebih dari satu macam jenis pangan dalam piring sekali makan sehingga dapat memenuhi komponen gizi secara lengkap. Seimbang artinya pangan mengandung komponen-komponen yang cukup secara kuantitas,

cukup secara kualitas, dan mengandung berbagai zat gizi (karbohidrat, lemak, protein, vitamin dan mineral) yang diperlukan tubuh. Salah satu komponen penting dari produk pangan adalah aspek keamanannya. Suatu produk pangan yang aman harus bebas dari cemaran fisik, kimia, dan mikrobiologi. Keamanan dari setiap makanan yang dikonsumsi perlu diperhatikan agar terhindar dari dampak negatif yang mungkin ditimbulkan suatu produk pangan.

Adanya Program BPNT ditujukan sebagai upaya peningkatan taraf hidup masyarakat khususnya bagi masyarakat miskin agar dapat mewujudkan keluarga sejahtera salah satunya untuk memperkuat ketahanan pangan rumah tangga. Sehingga diharapkan pelaksanaan program BPNT dapat berjalan secara efektif dan efisien agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Pelaksanaan penyaluran BPNT di Kabupaten Batang Hari Telah Berjalan dan telah terlaksana sejak tahun 2017. Keseluruhan penerima manfaat Program BPNT di Kabupaten Batang Hari berdasarkan pada kategori keluarga miskin atau yang sekarang disebut dengan keluarga prasejahtera.

Berdasarkan masalah tersebut maka peneliti merumuskan masalah pada rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana deskripsi program dan penerima Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari?
2. Bagaimana efektivitas penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari?
3. Apakah terdapat perbedaan ketahanan pangan pada KPM dan bukan KPM Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan diatas maka tujuan penelitian sebagai berikut:

- 1 Untuk mendeskripsikan program dan penerima Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari?
- 2 Untuk menganalisis efektivitas penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari?
- 3 Untuk menganalisis perbedaan ketahanan pangan pada KPM dan bukan KPM Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari?

1.4. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini diharapkan peneitian ini memberi kegunaan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian dapat menggambarkan dampak Bantuan Pangan Non Tunai terhadap tingkat ketahanan pangan keluarga di Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari.
2. Hasil penelitian dapat dijadikan rujukan dalam mengukur efektivitas pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari, sehingga dapat memperlancar pelaksanaan program tersebut.
3. Hasil penelitian dapat dijadikan alat untuk menyusun kebijakan dalam menyusun strategi pada Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari.

4. Menambah khazanah keilmuan pembaca dan peneliti khususnya dalam bidang keilmuan agribisnis, kemiskinan dan kesejahteraan. Sehingga dapat diterapkan oleh masyarakat banyak dan peneliti lain yang membahas permasalahan yang sama dengan peneliti.